

EVALUASI PENERIMA PERLINDUNGAN SOSIAL DI DESA LABUHAN SUMBAWA, KABUPATEN SUMBAWA

M Aries Zuhri Angkasa¹, Sri Nurhidayati², Sefti Utami³, Ieke Wulan Ayu^{4*}, Neri Kautsari⁵

¹Fakultas Pertanian, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

³Fakultas Kesehatan, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

⁴Pascasarjana Magister Agribisnis, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

⁵Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB, Indonesia

Penulis Korespondensi: iekewulanayu002@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 01 November 2024 Revised: 30 November 2024 Published: 30 Desember 2024	Kemiskinan (<i>poverty</i>) merupakan salah satu permasalahan sosial kompleks dan multidimensional bagi negara-negara berkembang. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penerima bantuan sosial di Desa Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Penelitian dilaksanakan di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dari Bulan Oktober-November 2024, menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling, dan judgment sampling dengan responden penelitian sebanyak 50 orang. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis bantuan sosial yang diterima responden yaitu PKH, BPNT, dan BLT. Jumlah keluarga miskin mengalami penurunan di beberapa wilayah dusun di Desa Labuhan Sumbawa. Penerima PKH belum merupakan RTSM, ditinjau dari variabel pekerjaan, dan pendapatan.
Keywords Rumah Tangga Miskin; Pesisir; Bantuan Sosial;	

PENDAHULUAN

Kemiskinan (*poverty*) merupakan salah satu permasalahan sosial kompleks dan multidimensional, dan menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, dan untuk mengakhiri kemiskinan PBB mengusulkan tanpa kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan tujuan ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 (United Nations, 2024). Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal) kesehatan dan pendidikan. Salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan sosial ekonomi adalah kemiskinan sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menghadapi kemiskinan. Perhitungan PPP dari Bank Dunia akan meningkatkan jumlah warga miskin dari 54 juta dari PPP 2011 menjadi 64 juta berdasarkan PPP 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Nurhadi, 2007), menjalani kehidupan secara bermartabat (Henry *et al.*, 2022). Kemiskinan melibatkan berbagai dimensi lainnya seperti akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang berkualitas,

serta kesempatan ekonomi yang adil dan merata (Nabila *et al.*, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat miskin dan mengatasi kemiskinan. Kemiskinan selalu menjadi perhatian utama bagi pembuat kebijakan karena berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum (Chen dan Ravallion, 2012). Utomo *et al.* (2014), menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu perwujudan kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu program perlindungan sosial. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2012) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan. Perlindungan sosial di Indonesia diketahui mulai diberikan sekitar tahun 1997-1998 karena adanya kerentanan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Saat itu, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial nasional (JPS). Bantuan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas kemiskinan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, namun juga sebagai program perlindungan dalam upaya meminimalisir kerentanan ekonomi keluarga miskin. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, mendefinisikan bantuan sosial sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, yang diberikan tidak secara terus-menerus dan bersifat selektif, baik dalam bentuk uang maupun barang (Fadhli *et al.*, 2021).

Program perlindungan sosial ini menyentuh seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Desa Labuhan Sumbawa merupakan salah satu desa miskin di Sumbawa dengan indikator rendahnya sumber daya manusianya, tingkat penghasilan rendah, kesehatan rendah, mata pencaharian penduduk sebagian besar sebagai petani, nelayan, buruh, dan bekerja di sektor-sektor informal. Berdasarkan data kemiskinan hasil pemetaan swadaya masyarakat dapat teridentifikasi sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Labuhan Sumbawa adalah masyarakat miskin sebesar 1.258 KK yang tersebar di 6 Dusun yaitu Dusun Kauman, Dusun Olat Rarang, Dusun Pasir, Dusun Kali Baru, Dusun Padak, Dusun Griya Idola dengan sasaran KK miskin sebesar 1.258 KK (Pemerintah Desa Labuhan Sumbawa, 2024), dengan dampak dari program tersebut terhadap pengentasan kemiskinan belum banyak dikaji. Penyaluran yang tidak merata, alur pendaftaran sebagai calon penerima bantuan sosial, yang rumit serta cenderung berlarut-larut, informasi

terkait jenis serta mekanisme bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat masih sangat minim merupakan kendala permasalahan terkait bantuan sosial. Permasalahan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat dapat memberikan rasa ketergantungan bagi penerimanya, karena yang seharusnya dana tersebut diterima oleh penduduk miskin. Sampai saat ini, informasi penelitian terkait analisis pengaruh perlindungan sosial dan tenaga kerja untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih minim. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penerima bantuan sosial di Desa Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dari Bulan Oktober-Desember 2024, menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penerima bantuan sosial dengan menggunakan daftar pertanyaan. Data sekunder dibutuhkan guna mendukung data primer, yaitu buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, catatan harian, situs internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan observasi, dan dokumentasi. Responden penelitian adalah penerima bantuan sosial dalam program perlindungan sosial dan tenaga kerja dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis dampak pengaruh program perlindungan sosial dilakukan dengan: 1) Analisis deskriptif dan 2) Analisis regresi. Analisis deskriptif dilakukan dengan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, dan faktual. Analisis deskriptif responden akan ditabulasi dan dipersentasekan dengan rumus (Nusraningrum *et al.*, 2021):

$$P = \frac{f_i}{\sum f_i} \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Persentase responden yang memiliki kategori tertentu
- f_i = Jumlah responden yang memilih kategori tertentu
- Σf_i = Total jawaban

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil identifikasi perlindungan sosial di Desa Labuhan Sumbawa dari 50 responden, disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Identifikasi Bantuan Sosial

No	Dusun	PKH	Bansos Lainnya	BLT
1.	Kauman	3	1	-
2.	Pasir	12	-	-

3.	Muhajirin	8	4	-
4.	Padak	6	4	-
5.	Griya Idola	2	-	-
6.	Olat Rarang	1	1	1
7.	Kali Baru	5	-	-
8.	Rinjani	-	2	-
9.	Saliper Ate	-	1	1
Total		37	13	

Sumber: Data primer diolah (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa, pada setiap dusun di Desa Labuhan Sumbawa terdapat penerima bantuan sosial, yaitu PKH (37 orang), BPNT, dan BLT dengan total 13 orang, dengan identifikasi penerima sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH).

Terdapat penerima PKH di Desa Labuhan Sumbawa sebanyak 37 orang dari 50 total responden yang diteliti. Hasil identifikasi penerima bantuan sosial di Desa Labuhan, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden Sebagai Penerima PKH di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas

No.	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Usia (Tahun)		
	- 56-65	17	45
2.	Jenis Kelamin		
	- Perempuan	36	97
3.	Pendidikan		
	- SD	27	72
4.	Pekerjaan		
	- Pedagang	10	27
5.	Pendapatan		
	- Rp. 1.500.000 - 3.000.000	17	45
6.	Pengeluaran		
	- Rp. 1.000.000 - 2.500.000	29	78
7.	Jumlah Anggota Keluarga		
	- 3-5 orang	29	78
8.	Status Perkawinan		
	- Menikah	27	72
9.	Lama Bekerja		
	- 10-30 Tahun	10	27

Sumber: Data primer diolah (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH, rata-rata berusia 56-65 tahun (45%), sebagian besar berjenis kelamin perempuan (97%), pendidikan SD (72%), dengan pekerjaan sebagian besar adalah pedagang (27%), memiliki pendapatan yaitu Rp. 1.500.000 - 3.000.000 (45%), pengeluaran yaitu Rp. 1.000.000 - 2.500.000 (78%), jumlah tanggungan keluarga 3-5 orang (78%), memiliki status perkawinan, yaitu menikah, dan lama bekerja 10-30 tahun (27%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerima, PKH masih belum merupakan RTSM, jika dilihat dari variabel pekerjaan, dan pendapatan. PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*) yakni program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial (Kemensos, 2013).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Labuhan Sumbawa sebanyak 11 orang dari 50 total responden yang di teliti. Hasil identifikasi penerima bantuan sosial di Desa Labuhan, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Sebagai Penerima BPNT di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas

No.	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Usia (Tahun)		
	- >65	4	36
2.	Jenis Kelamin		
	- Perempuan	7	63
3.	Pendidikan		
	- SD	6	54
4.	Pekerjaan		
	- Tidak Bekerja	5	45
5.	Pendapatan		
	- Tidak ada pendapatan	0	0
6.	Pengeluaran		
	- Rp. 1.000.000 - 2.500.000	9	81
7.	Jumlah Anggota Keluarga		
	- 3-5 orang	7	63
8.	Status Perkawinan		

- Menikah	8	72
9. Lama Bekerja		
- 20-30 Tahun	3	27

Sumber: Data primer diolah (2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa penerima manfaat BPNT, rata-rata berusia >65 tahun (36%), sebagian besar berjenis kelamin perempuan (63%), pendidikan SD (54%), dengan tidak bekerja (45%), tidak memiliki pendapatan (0%), pengeluaran yaitu Rp. 1.000.000 - 2.500.000 (81%), jumlah tanggungan keluarga 3-5 orang (63%), memiliki status perkawinan, yaitu menikah (72%), dan lama bekerja 10-30 tahun (27%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerima, BPNT sesuai kategori untuk diberikan.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hasil identifikasi penerima bantuan sosial program BLT di Desa Labuhan, disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Responden Sebagai Penerima BLT di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas

No.	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Usia (Tahun)		
	- 50	1	50
	- 74	1	50
2.	Jenis Kelamin		
	- Perempuan	2	100
3.	Pendidikan		
	- SD	2	100
4.	Pekerjaan		
	- Tidak Bekerja	1	50
	- Bekerja	1	50
5.	Pendapatan		
	- Tidak ada pendapatan	1	50
	- 1.500.000 - 3.000.000	1	50
6.	Pengeluaran		
	- Rp. 1.000.000 - 2.500.000	2	100
7.	Jumlah Anggota Keluarga		
	- 3-5 orang	2	100
8.	Status Perkawinan		
	- Cerai mati	1	50
	- Menikah	1	50
9.	Lama Bekerja		

- Tidak bekerja	1	50
- 1-10 Tahun	1	50

Sumber: Data primer diolah (2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa penerima manfaat BLT, berusia 50 dan 74 tahun (masing-masing 50 %), sebagian besar berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan SD (masing-masing 100 %), dengan bekerja (50%), dan tidak bekerja (50%), yang bekerja memiliki pendapatan (50%) dan tidak bekerja berdampak terhadap tidak memiliki pendapatan (50 %), pengeluaran yaitu Rp. 1.000.000 - 2.500.000 (81%), jumlah tanggungan keluarga 3-5 orang (100%), memiliki status perkawinan,yaitu menikah dan cerai mati (masing-masing 50 %), dan lama bekerja, untuk yang bekerja 1-10 tahun (50%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerima, BLT sesuai kategori untuk diberikan.

Hasil indikasi kemiskinan, bahwa responden penerima PKH yang termasuk dalam kategori miskin atau tergolong dalam rumah tangga sangat miskin termasuk ke dalam responden yang memenuhi kategori dibawa 9 indikasi kemiskinan menurut BPS. Hal ini,dilihat dari variabel umur, pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga variabel tersebut memperlihatkan usia produktif, upaya dalam mendapatkan penghasilan, serta terdapat peningkatan kesejahteraan. Kondisi ekonomi sosial masyarakat menunjukkan masyarakat sudah bermata pencaharian sebagai pedagang, asisten rumah tangga, penjahit. Perubahan mata pencaharian masyarakat mengalami perubahan signifikan dari parameter yang sudah di tentukan. Terdapat peningkatan kesejahteraan dari rumah tangga miskin. Jika dilihat dari demografi kemajuan dapat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang sudah dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Namun, untuk responden atau warga yang masih dalam kategori RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH wajib untuk diberikan bantuan untuk kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan kondisi usia penerima PKH tidak ada dalam syarat sebagai ibu hamil, atau memiliki balita balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Berikut dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Sesuai apa yang dikemukakan maslow dalam hirarki kebutuhan dasar, termasuk kategori tingkatan kebutuhan fisiologikal atau fisik dan aktualisasi diri yang berhubungan dengan fokus pemenuhan kebutuhan dasar yang di garap oleh PKH tersebut. Sebagai penerima manfaat PKH, keluarga tersebut memiliki hak dan tanggung jawab tertentu. Hak yang diberikan mencakup penerimaan bantuan uang tunai serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, yang jumlahnya bervariasi tergantung pada jumlah anggota keluarga atau komponen yang dimiliki. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan (Wahyuni *et al.*, 2023).

Hasil indikasi kemiskinan, bahwa responden penerima BPNT yang termasuk dalam kategori miskin atau tergolong dalam rumah tangga sangat miskin termasuk ke dalam responden yang memenuhi kategori diatas 9, dan masuk dalam dipertimbangkan untuk diberikan bantuan, terutama bagi lansia untuk kesehatan. Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pembangunan manusia. Pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keadaan kesehatan masyarakat dapat ditentukan oleh angka kematian, kesakitan, dan status gizi. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan merupakan hal yang menjadi perhatian serius bagi para tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan di seluruh tingkatan di Indonesia (Anggraeni *et al.*, 2023). Haughton & Shahidur (2010) salah satu karakteristik penyebab kemiskinan yaitu rumah tangga dan individu. Karakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari salah satunya status kesehatan dan nutrisi. Hasil penelitian Astuti (2018), menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari sedikit berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Kepala rumah tangga yang memiliki riwayat penyakit berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin ekstrem (Wahyudi *et al.*, 2023).

Hasil indikasi kemiskinan, bahwa responden penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menerima bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai atau bantuan lainnya. Meskipun tujuan utamanya bukan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara langsung, BLT berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada rumah tangga miskin. Selain itu, program tersebut bertujuan untuk menjaga pendapatan keluarga miskin dan mengurangi beban finansial mereka, sehingga mereka dapat terhindar dari risiko sosial yang mungkin terjadi, terutama selama periode tertentu (Latif & Pangestu, 2022).

KESIMPULAN

1. Karakteristik penerima PKH, rata-rata berusia 56-65 tahun (45%), sebagian besar berjenis kelamin perempuan (97%), pendidikan SD (72%), dengan pekerjaan sebagian besar adalah pedagang (27%), memiliki pendapatan yaitu Rp. 1.500.000 - 3.000.000 (45%), pengeluaran yaitu Rp. 1.000.000 - 2.500.000 (78%), jumlah tanggungan keluarga 3-5 orang (78%), memiliki status perkawinan,yaitu menikah, dan lama bekerja 10-30 tahun (27%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerima, PKH masih belum merupakan RTSM, jika dilihat dari variabel pekerjaan, dan pendapatan.
2. Penerima manfaat BPNT, rata-rata berusia >65 tahun (36%), sebagian besar berjenis kelamin perempuan (63%),pendidikan SD (54%), dengan tidak bekerja (45%), tidak memiliki pendapatan (0 %), pengeluaran yaitu Rp. 1.000.000 - 2.500.000 (81%), jumlah tanggungan keluarga 3-5 orang (63%), memiliki status perkawinan,yaitu menikah (72%), dan lama bekerja 10-30 tahun (27%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerima, BPNT sesuai kategori untuk diberikan.

3. Penerima manfaat BLT, berusia 50 dan 74 tahun (masing-masing 50 %), sebagian besar berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan SD (masing-masing 100 %), dengan bekerja (50%), dan tidak bekerja (50%), yang bekerja memiliki pendapatan (50%) dan tidak bekerja berdampak terhadap tidak memiliki pendapatan (50 %), pengeluaran yaitu Rp. 1.000.000 - 2.500.000 (81%), jumlah tanggungan keluarga 3-5 orang (100%), memiliki status perkawinan,yaitu menikah dan cerai mati (masing-masing 50 %), dan lama bekerja, untuk yang bekerja 1-10 tahun (50%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerima, BLT sesuai kategori untuk diberikan

SARAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa wajib memahami bahwa jumlah keluarga miskin mengalami penurunan di beberapa wilayah dusun di Desa Labuhan Sumbawa sehingga perlu adanya pendataan penduduk ulang guna mengetahui berapa banyak keluarga miskin di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas. Kebijakan program bansos yang telah dilaksanakan kemudian dapat bermanfaat sebagai dorongan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan layanan sosial seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan juga mendapatkan akses terhadap program perlindungan lainnya. Maka sangat perlu dilakukan adanya pendataan penduduk ulang guna mengetahui berapa banyak keluarga miskin di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas. Hal ini dilakukan terhadap ketepatan dalam penyerahan dana bantuan pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- United Nations about the Sustainable Development Goals. Available online: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (Diakses pada Oktober,2024).
- Priseptian & Primandhana, (2022).
- Henry.,OK Yuanita FD Sidabutar, & Bambang Hermanto. 2022. Kajian Faktor Natural Dan Kultural Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan (Medan Utara). *Jurnal Potensi*, 2(2). <https://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Potensi/article/view/1014>
- Nabila, A. S., Idris, N. A., Arimbi, S. N., Rahmadani, S., Ramadhani, F., Ferawaty, F., & Abd Muis, A. 2023. Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesetaraan. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 1-14.
- Chen, S., & Ravallion, M. 2012. More Relatively-Poor People in a Less Absolutely-Poor World. *Review of Income and Wealth*, 59(1), 1–28. doi:10.1111/j.1475-4991.2012.00520.
- Utomo *et al.* (2014),
- Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. 2021. Analisis perubahan pola konsumsi masyarakat penerima bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Education and development*, 9(3), 110-117.

- Pemerintah Desa Labuhan Sumbawa. 2024. Profil Desa Labuhan Sumbawa. <https://www.labuhan-sumbawa.sumbawakab.go.id/index.php/artikel/2020/8/26/sejarah-des>. (diakses pada September 2024).
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. 2023. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 11-22.
- Anggraeni, R. M., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2023). The Influence of Government Spending in Education and Health Sector Towards Human Development Index in Java Island. *Science and Education*, 2, 971–977
- Prasetyo, D., Sa'adah, N., & Azhar, M. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Aupb) Di Kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Astuti, W. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang). *Economics Development Analysis Journal* 7 (2) .
- Haughton, J., & Shahidur, R. (2010). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, et al. 2023. Analisis Kemiskinan Ekstrem Provinsi Bengkulu Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (Gwr) Dengan Pembobot Adaptive Gaussian Kernel Dan Adaptive Bi-Square. *Journal Of Mathematics UNP* Vol. 8, No. 2, Juni 2023, pp. 134~149.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95-107.